



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR SEK.2-35.KP.03.04 TAHUN 2021

TENTANG

PENYESUAIAN/*INPASSING* DALAM JABATAN FUNGSIONAL ARSIPARIS
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemenuhan kebutuhan Jabatan Fungsional Arsiparis di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, perlu untuk mengangkat Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Arsiparis;
- b. bahwa berdasarkan surat rekomendasi Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 447 Tahun 2019 tanggal 31 Desember 2019, Nomor 401 Tahun 2020 tanggal 28 Desember 2020 dan Nomor 398 Tahun 2020 tanggal 28 Desember 2020, Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini telah memenuhi syarat untuk diangkat dalam Jabatan Fungsional Arsiparis melalui mekanisme penyesuaian/*inpassing*;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang penyesuaian/*inpassing* dalam Jabatan Fungsional Arsiparis di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan LN Nomor 5494);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
3. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2017 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Arsiparis;
4. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 Tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 235);
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 48 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Arsiparis dan Angka Kreditnya ;
6. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 24 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Arsiparis;
7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015, tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015, tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
8. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Manajemen Karier Pegawai Negeri Sipil Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

MEMUTUSKAN: . . .

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENYESUAIAN//*INPASSING* DALAM JABATAN FUNGSIONAL ARSIPARIS DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA.
- KESATU : Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 2, disesuaikan/*inpassing* dalam Jabatan Fungsional Arsiparis sebagaimana tersebut dalam lajur 5, dengan angka kredit sebagaimana tersebut dalam lajur 6 daftar lampiran Keputusan ini dan diberikan tunjangan jabatan fungsional sesuai ketentuan yang berlaku.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal pelantikan.
- KETIGA : Petikan Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Maret 2021

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
KEPALA BIRO KEPEGAWAIAN,



PUTRISNO
NIP. 196210151985031002

Tembusan:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
3. Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia;
4. Kepala Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Badan Kepegawaian Negara;
5. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang bersangkutan;
6. Kepala Unit Pelaksana Teknis yang bersangkutan;
7. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang bersangkutan;
8. Pembuat Daftar Gaji yang bersangkutan.

DAFTAR LAMPIRAN KEPUTUSAN
 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : SEK.2-35.KP.03.04 TAHUN 2021
 TANGGAL : 24 Maret 2021

NO	NAMA / NIP	PANGKAT GOL. RUANG	JABATAN LAMA	JABATAN BARU	ANGKA KREDIT
1	2	3	4	5	6
1.	AZMY SURYANI, S.H. NIP. 198111302003122001	Penata Tk.I (III/d)	Pengola BMN pada Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas I Bengkulu	Arsiparis Muda pada Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas I Bengkulu	0
2.	SITI KHUSNUL FAJRIYAH, S.Kom. NIP. 198609162006042002	Penata (III/c)	Pengatministrasi Umum pada Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Yogyakarta	Arsiparis Muda pada Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Yogyakarta	0
3.	OKY ADI PURBOWO, S.E. NIP. 197910182007031001	Penata (III/c)	Penyusun Bahan Kerjasama pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia D.I Yogyakarta	Arsiparis Muda pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia D.I Yogyakarta	0
4.	NORMAN ARIEF WIBOWO, S.H. NIP. 198211142006041001	Penata (III/c)	Pengolah Data Laporan pada Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	Arsiparis Muda pada Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	0
5.	ADI, S.H. NIP. 198211012006041001	Penata (III/c)	Pengolah Data Laporan pada Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	Arsiparis Muda pada Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	0
6.	LUCKY AYU PUSPITA, S.E. NIP. 197812282009122004	Penata (III/c)	Penyusun Laporan Keuangan pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	Arsiparis Muda pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	50
7.	IKHA SAPTA NINGROEM, A.Md., S.H. NIP. 198707062009122004	Penata Muda Tk.I (III/b)	Analisis Pengaduan Masyarakat pada Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	Arsiparis Pertama pada Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	0
8.	IIS TRISNAWATI, S.H. NIP. 19831221200912007	Penata Muda Tk.I (III/b)	Penyusun Informasi Hukum pada Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	Arsiparis Pertama pada Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	0
9.	HARTATI, A.Md., S.H. NIP. 198011082009122002	Penata Muda Tk.I (III/b)	Penyusun Laporan dan Hasil Evaluasi pada Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	Arsiparis Pertama pada Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	0
					10 ...

1	2	3	4	5	6
10.	BONAVIA NUGROHO PUTRO, S.E. NIP. 198305222008011003	Penata Muda Tk.I (III/b)	Pengolah Data Laporan pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia D.I Yogyakarta	Arsiparis Pertama pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia D.I Yogyakarta	25
11.	ARIF MASKURI, AMK., S.H. NIP. 197907292006041001	Penata Muda Tk.I (III/b)	Pengolah Data Perencanaan dan Program pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	Arsiparis Pertama pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	37.5
12.	ARWAN HAMDANI PRAYITNO, S.H. NIP. 198005192006041001	Penata Muda Tk.I (III/b)	Pengolah Data Laporan Pemeliharaan Perlengkapan pada Lembaga Pemasarakatan Narkotika Kelas IIA Yogyakarta	Arsiparis Pertama pada Lembaga Pemasarakatan Narkotika Kelas IIA Yogyakarta	0
13.	MELA SARI, S.H. NIP. 198503202015032002	Penata Muda Tk.I (III/b)	Analisis Evaluasi Peraturan Perundang-undangan pada Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	Arsiparis Pertama pada Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	12.5
14.	SYARIFUDDIN, S.H. NIP. 198110052007031002	Penata Muda Tk.I (III/b)	Pengelola Hasil Kerja pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	Arsiparis Pertama pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	25



a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
KEPALA BIRO KEPEGAWAIAN,



Sutrisno
NIP. 196210151985031002